



Judul : Sejumlah Ketum Parpol disandera Jokowi
Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Sejumlah Ketum Parpol Disandera Jokowi

PDIP menyebut langkah Gibran sebagai politik pembangkangan terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap kartu truf para ketua umum partai politik dipegang penguasa.

Hal itu terkait dengan dukungan sejumlah ketum parpol kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming

Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf mereka dipegang," kata Hasto melalui keterangan tertulis, kemarin.

Hasto tidak mengungkap persis para ketum parpol tersebut. Se lain itu, ia mendapat pengakuan adanya tekanan luar biasa dari

penguasa. "Ada yang mengatakan 'life time saya hanya harian', lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujar Hasto.

Ia berharap situasi demokrasi yang terlihat jelas saat ini cepat berlalu. Hasto meyakini rakyat Indonesia paham untuk dapat memilih jalan yang benar.

"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," ucap Hasto.

Hasto juga menyebut langkah Gibran sebagai politik pembangkangan terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. "Kesemuanya

dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ucap Hasto.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menyebut perseteruan

Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai bukan dendam hingga persoalan Kepala Negara kerap direndahkan, melainkan adanya perbedaan kepentingan.

Jamiluddin mengatakan Jokowi punya kepentingan untuk mengamankan dirinya seusai lengser menjabat presiden, berkaitan juga dengan keluarga dan kroni-kroninya.

Memutarbalikkan fakta

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan internal PDIP terbelah dua. "Isu ini tidak solid di PDIP, utamanya kelompok elite terkesan masih menjaga wibawa Jokowi, Puan (Maharani) misalnya," kata saat dihubungi Medcom.id, kemarin.

Dedi mengatakan kelompok yang masih menjaga Jokowi, seperti Puan, menyadari cara menekan semacam itu bisa membuat Kepala Negara kian populis. Terlebih Jokowi andal mencitrakan diri sebagai korban.

"Itulah sebab PDIP bahkan tidak memecat Jokowi karena tahu Jokowi pintar memutarbalikkan fakta," ujar Dedi.

Kemudian, kelompok yang frontal ialah mereka yang mulai menyebarkan narasi konfrontasi. "Sementara kelompok yang frontal adalah aktivis semacam Adian karena Adian lebih menyukai hal-hal konfrontatif," ucap Dedi. (Fab/P-2)